

2.3. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah

Setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan, memiliki permasalahan yang berbeda menurut dimensi maupun kurun waktu. Permasalahan yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasinya akan menjadi fokus utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama dalam penyusunan program kegiatan dan arah kebijakan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan pokok, global, dan menyeluruh baik dari segi wilayah maupun waktu karena permasalahan tersebut terus muncul berdampingan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator dalam melihat permasalahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memperhatikan kesenjangan antara kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dicapai saat ini dengan target pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan sebagai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada kondisi atau gambaran umum daerah sekaligus evaluasi kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 antara lain permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

2.3.1.1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan;

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi

berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

a. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan transportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai.

b. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 1,2 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.

Pelayanan umum karena semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antarprovinsi mesti diimbangi dengan jasa layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utara-selatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.

e. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.

2.3.1.2. Masalah pengembangan ekonomi lokal;

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain

menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

2.3.1.3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya. Tak terkecuali provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah:

- a. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
- b. Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir.
- c. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2.3.1.4. Masalah bidang kesejahteraan sosial

Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan layanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi isu utama tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, baik sebagai *enabler* aktivitas pembangunan maupun tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan layanan yang baik, seperti layanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan budaya dan wisata. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi.
- b. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.

- c. Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.
- d. Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

2.3.1.5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi

Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.

Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan ini ditandai dengan:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah.
- b. Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- c. Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur.
- d. Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- e. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- f. Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- g. Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- h. Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan.
- i. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

2.3.1.6. Masalah pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak izin-izin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan. Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.

Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). Inisiatif *Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Pulau Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja *HoB* membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas

seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan *HoB* serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

Tabel 2.25
Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Permasalahan Utama	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan infrastruktur pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan (aksesibilitas masih rendah)- Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan- Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat dan masih terbatasnya sumber energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kabupaten/kota- Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanan dasar menjadi sulit	<ul style="list-style-type: none">- Pembukaan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan- Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar utamanya perumahan dan kesehatan (listrik, air bersih, sanitasi, dsb)- Ketersediaan lahan dan bahan baku penunjang peningkatan infrastruktur pembangunan- Pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan serta ketersediaan bahan bakar gas
2.	Pengembangan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional- Masih rendahnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan- Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian (dalam arti luas)- Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi termasuk industrialisasi pertanian- Penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan nilai tambah usaha pertanian- Peningkatan daya saing produk unggulan daerah- Peningkatan promosi produk unggulan daerah



No.	Permasalahan Utama	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dan pengelolaan destinasi wisata</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal- Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi, dan kerjasama investasi- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif- Masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM- Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar- Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis ekonomi berkelanjutan- Belum berkembangnya pemasaran hasil produk usaha utamanya usaha kecil menengah	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan/fasilitasi pelatihan wirausaha mandiri- Penetapan perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan investasi dan pelaksanaan pembangunan daerah- Peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja
3.	Kualitas dan keterjangkauan pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang masih minim aksesibilitasnya sehingga pemerataan sarana prasarana pendidikan masih minim- Tingkat pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil belum optimal- Kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan masih perlu ditingkatkan (masih rendah)- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi- Pengembangan sekolah kejuruan terutama pendidikan yang dapat langsung diserap oleh pasar tenaga kerja- Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembukaan aksesibilitas wilayah terpencil
4.	Kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none">- Masih tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah dan kelompok pendapatan- Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan- Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular- Masih tingginya angka kemiskinan pada beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah- Pengangguran sudah cukup rendah namun sebagian besar pekerja bekerja di sektor pertanian (tradisional)- Belum optimalnya peningkatan kualitas	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan- Penambahan dan pemerataan jumlah tenaga medis ke seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah- Peningkatan kualitas dan kuantitas paramedis- Jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tanpa terkecuali- Peningkatan usaha pertanian dalam arti luas dan sektor padat karya lainnya.- Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun



No.	Permasalahan Utama	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		kependudukan dan ketenagakerjaan termasuk kualitas keluarga, pemuda, dan olahraga	besar - Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4
5.	Pengembangan kapasitas birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Lemahnya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota- Masih perlu peningkatan dan pemeliharaan kerukunan hidup antar suku, ras, dan agama yang berkelanjutan- Belum terselenggaranya pelayanan prima pemerintah daerah secara utuh dan menyeluruh- Rendahnya pengawasan dan transparansi dalam birokrasi (mencegah KKN)- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota (meskipun sudah otonomi daerah)- Sosialisasi kerukunan hidup antar suku, ras, dan agama- Peningkatan kualitas pelayanan publik- Pengawasan laporan keuangan dan penggunaan anggaran program kegiatan pembangunan- Rekrutmen aparatur pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
6.	Pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none">- Belum terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung ekonomi berkelanjutan- Belum efisiennya pendayagunaan sumber daya alam (nilai tambah produksi masih rendah)- Kurang maksimalnya usaha penarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none">- Pengendalian perizinan pembukaan lahan harus sesuai asas berkelanjutan- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan- Implementasi penggalian sumber daya alam berdasarkan ekonomi berkelanjutan

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2.26
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kriteria/Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban	Wajib	Adanya Perda IMB dan	Tidak ada masalah



No	Kriteria/Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		umum daerah		kependudukan	
		Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib	Penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja tepat waktu	Tidak ada masalah
		Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib	Kesesuaian prioritas pembangunan	Tidak ada masalah
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Perda yang ditetapkan	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Tidak ada masalah
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Jumlah perda yang dibatalkan	Tidak ada masalah
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemprov dalam rangka penyusunan perda	Tidak ada masalah
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Informasi tentang dana perimbangan diusahakan agak lambat diterima yg mempengaruhi penganggarannya
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	PAD masih kecil persentasenya terhadap pendapatan dalam APBD
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Hasil opini memperlihatkan bahwa lapkeu masih ada kekurangannya
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Peningkatan PAD	Peraturan Daerah untuk mengatur pajak dan retribusi daerah batu keluar, yang membantu meningkatkan PAD
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Inovasi masih terbatas



No	Kriteria/Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/Pilihan	Program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Secara khusus nomenklatur program mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang masih ada perbedaan nomenklaturnya dengan program nasional
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/Pilihan	Jumlah PERDA yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.	Sudah ditindaklanjuti
		Tingkat capaian SPM	Wajib/Pilihan	SPM yang telah dilaksanakan	Masih ada pelayanan yang belum ada paying hukum untuk penerapan SPM
		Penataan kelembagaan daerah	Wajib/Pilihan	Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/Pilihan	Struktur jabatan yang terisi pada Tahun yang bersangkutan.	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/Pilihan	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SKPD	Dokumen perencanaan di SKPD belum tepat waktu disusunnya
		Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/Pilihan	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD.	Penetapan pagu anggaran masing-masing SKPD tergantung kepada prioritas program yang dilaksanakannya
		Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/Pilihan	Keberadaan Inventis barang atau aset SKPD.	Inventarisasi barang milik daerah masih lemah
		Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/Pilihan	Jumlah fasilitas/prasarana informasi Papan Pengumuman Pos Pengaduan.	Setiap SKPD memiliki fasilitas/prasarana informasi papan pengumuman
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	a.	Kesejahteraan masyarakat			
		Pelayanan umum	Wajib/Pilihan	Tingkat kepuasan pelayanan	Tidak masalah
		Daya saing daerah	Wajib/Pilihan	Besarnya minat investasi ke daerah	Tidak masalah
III	Daerah Otonomi Baru				
		Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/Pilihan	Perda tentang perangkat daerah	Tidak masalah
		Pengisian personil	Wajib/Pilihan	Aparat yang sesuai kepangkatan	Tidak masalah
		Pengisian keanggotaan DPRD	Wajib/Pilihan	Pemilu dan PAW	



No	Kriteria/Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Wajib/Pilihan	-	
		Pembiayaan	Wajib/Pilihan	-	
		Pengalihan aset dan dokumen	Wajib/Pilihan	-	
		Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Wajib/Pilihan	Kesepakatan daerah perbatasan, keputusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	
		Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Wajib/Pilihan	Ketersediaan anggaran	
		Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Wajib/Pilihan	-	

Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi diperoleh permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.27
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat ketahanan pangan (menjaga ketersediaan bahan pokok) dan energi	Penyediaan infrastruktur dasar, transportasi, pengairan, hingga kelistrikan	Infrastruktur yang menghubungkan antar provinsi, terutama di wilayah antar provinsi di Kalimantan masih terbatas
2.	Masih diperlukan percepatan pengurangan kemiskinan	Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal	Komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global
3.	Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan (keadilan, pemerataan, dan rasa memiliki) → <i>inclusive development</i>	Masih banyaknya desa tertinggal dan wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari akses pelayanan umum	Masalah tata batas antar provinsi dan pengembangan daerah perbatasan antar provinsi
4.	Perlu meningkatkan <i>added value</i> pemanfaatan potensi dan peluang sepertisumber daya	Sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah antar bidang pembangunan	Keberpihakan terhadap pembangunan di Kalimantan yang masih kurang menimbulkan



No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar		kesenjangan wilayah, padahal sumber daya alam cukup melimpah, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daerah penghasil
5.	Pembangunan berkelanjutan (<i>pro-environment</i>)	Penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai percontohan REDD+ (REDD Plus). Oleh karena itu, perlu kejelasan tata ruang, kelembagaan, monitoring dan evaluasi,dll	Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu tentang kelestarian lingkungan hidup